



PANCASILA

SEBAGAI

LANDASAN

POLITIK

LUAR NEGERI

KELOMPOK 12

NAMA ANGGOTA

Rahajeng Sekar W N	071911633033
Rosidah Maharani Alfi	071911633034
Alfito Nur Arafah	071911633054
Isnaeni Nur Fatimah	071911633090
Fatchorrahrman Zain	071911633094



“

Di atas landasan idiil Pancasila ini kita bisa membangun budinya bangsa Indonesia yang setinggi-tingginya. Dan inilah keyakinan kita, hanya di atas landasan idiil yang bernama Pancasila itu kita bisa membangun kita punya budi dan daya yang sesempurna-sempurnanya.

Soekarno

Latar Belakang

Setelah situasi Perang Dunia Kedua, dimana dunia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Di kondisi ini Indonesia memutuskan untuk menjadi pihak netral dimana mereka tidak memihak negara manapun. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia memutuskan untuk melakukan strategi politik bebas dan aktif



Tentara Jepang pada Perang Dunia Dua



Mohammad Hatta

Politik Bebas Aktif

Bebas berarti Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bebas menentukan keinginannya sendiri dalam hal mengatur negaranya dan juga dalam kaitannya dengan negara lain atau hubungan internasional tanpa adanya campur tangan dari negara lain.

Aktif diartikan bahwa Bangsa Indonesia ikut serta dalam berbagai hubungan internasional atau jika diambil dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

LANDASAN DALAM MENJALANKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

1. LANDASAN IDIIL

Gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang berisi pedoman bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Keterkaitan Pancasila dengan politik luar negeri dapat dilihat dari setiap sila Pancasila:

a. Sila pertama

mengakui manusia sebagai ciptaan Tuhan tanpa membedakan, Indonesia tidak menganut paham rasialisme dalam politik luar negerinya.

b. Sila kedua

Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Indonesia menerapkan unsur kesamarataan, kemanusiaan yang tinggi, saling menghormati.

c. Sila ketiga

Politik luar negeri Indonesia harus tetap memperhatikan dan mengabdikan pada kepentingan nasional bangsa kita sendiri.

d. Sila keempat

Pandangan bangsa Indonesia di setiap masalah internasional diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

e. Sila kelima

Menunjukkan pandangan Indonesia yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial yang berlingkup internasional dengan mengembangkan perbuatan yang luhur.



2. LANDASAN KONSTITUSIONAL

Berarti sebagai ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Terletak pada UUD 1945 alinea pertama dan keempat serta batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. salah satu contoh landasan politik luar negeri pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.



3. LANDASAN OPERASIONAL

Operasional disini diartikan sebagai konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu negara. Landasan operasional Indonesia selalu berubah- ubah karena pembuatannya yang terkait dengan kepentingan nasional yang saat itu ingin dicapai. Walaupun demikian, landasan operasional politik luar negeri tercantum dalam TAP MPR tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada akhirnya, politik luar negeri Indonesia harus tetap dijalankan dengan berdasarkan pada ketiga landasan tersebut.

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia



Meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan Nasional, sesuai dan tidak bertentangan dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila.



Tindakan Pemerintah Dalam Melakukan Politik Luar Negeri Dalam Era Globalisasi

Pada era globalisasi ini pemerintah Republik Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif dan tetap berlandaskan pada Pancasila yang berarti Indonesia berhak menentukan sikapnya di dunia Internasional tanpa campur tangan dari pihak lain, serta berlandaskan nilai-nilai yang tertuang pada Pancasila. Dengan berlandaskan politik luar negeri Indonesia pada Pancasila, Indonesia lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang bersifat diplomasi. Pemerintah lebih mengedepankan soft power atau tindakan yang dilakukan secara baik-baik yaitu persuasif, pendekatan budaya, psikologis, dan lain sebagainya.

Ancaman Yang Dihadapi Oleh Negara Indonesia Dalam Melakukan Politik Luar Negeri

Ada beberapa ancaman yang dihadapi oleh Negara Indonesia dalam melakukan politik luar negeri, contohnya tindakan terorisme. Bisa dikatakan paham-paham radikal tersebut datang dari luar negeri dan kemudian Indonesia menjadi target akan tindak terorisme dengan tujuan beberapa hal mulai dari ingin mengganti ideologi Indonesia.

Ancaman yang selanjutnya yaitu, negara lain terlalu ikut campur dengan urusan negara. Negara lain dilarang untuk ikut terlibat dalam urusan negara yang dapat menimbulkan hasutan untuk memecah belah hingga konflik vertikal yang menyebabkan perang saudara. Dalam UUD 1945 telah diatur bahwa negara berhak menentukan nasib dan urusan bangsa secara individu tanpa adanya campur tangan dari pihak asing tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Politik bebas aktif indonesia memiliki 3 landasan untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam menjalankan politik luar negerinya. Namun, di era globalisasi ini politik luar negeri indonesia mengalami berbagai macam kendala yang harus dihadapi. Selain itu, dalam menjalankan politik luar negeri pastinya memiliki ancaman baik dari pihak dalam maupun luar. Walaupun demikian politik luar negeri indonesia dapat berjalan dengan baik dengan berlandaskan pada ideologi bangsa indonesia yaitu pancasila.

SARAN



Langkah dan sifat yang telah ditularkan oleh negara Indonesia bagi dunia internasional seharusnya dapat menjadi contoh nyata bahwa semuanya dapat diselesaikan dengan langkah yang baik-baik, tidak semua permasalahan harus dilakukan dengan tindakan fisik dan bersifat memaksa.

Bagi pemerintah Indonesia, diperlukan suatu tindakan pencegahan terhadap manufer politik luar negeri memperketat kerjasama dengan negara negara sahabat contohnya. Langkah selektif dalam menjalin kerja sama dengan suatu negara juga akan mencegah suatu manufer politik yang membahayakan kestabilan negara.